



PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI - SEKRETARIS DEWAN

SEKRETARIS DEWAN - KEPALA BAGIAN

KEPALA BAGIAN – SUB.KOORDINATOR

SUB. KOORDINATOR - STAF



SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA



KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan Rahmatnya dan hidayahnya sehingga dapat menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagai bentuk awal pertanggung jawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan Perjanjian Kinerja ini, diharapkan para pemangku jabatan agar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sehingga pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, efektif dan akuntabel adalah di perlukan sikap yang sungguh-sungguh oleh seluruh penyelenggara Pemerintah terutama baik yang diberi amanah sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan, maka seluruh pejabat structural Sekretariat DPRD membuat dan menyatakan secara tertulis untuk merealisasikan kegiatan dengan pertanggungjawaban melalui Perjanjian Kinerja kepada atasan

Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan public dan kesejahteraan rakyat.

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA



Demikian laporan Perjanjian Kinerja ini dibuat dalam rangka Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat kami sampaikan dengan ucapan terima kasih.

Tenggarong, 28 Februari 2020

Sekretaris DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara

H.M. Ridha Darmawan, SP.MP
Pembina Utama Muda
Nip.19701117 199803 1 008

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan suatu tujuan pelaksanaan kegiatan sebagai unsur pelayanan terhadap anggota Dewan Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara Sehubungan hal tersebut, telah disusun Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah dan Peningkatan Kinerja OPD yang merupakan salah satu kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai sangat penting dan Strategis. Kartanegara yang sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah.

Sehubungan hal tersebut, telah disusun Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah dan Peningkatan Kinerja OPD yang merupakan salah satu kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat penting dan Strategis. Karena kegiatan ini merupakan bentuk komitmen penanggungjawab kegiatan untuk melaksanakan dengan sungguh – sungguh kegiatan yang telah dituangkan dalam dokumen rencana kerja Renja dengan komitmen OPD dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan perwujudan dan sikap aparatur penanggung jawab dan pelaksana rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh instansi / unit kerja. Perjanjian Kinerja ini merupakan pernyataan atau sebuah komitmen yang menggambarkan upaya pencapaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA



1. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Adapun Kegiatan penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan dan bertujuan untuk :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Percepatan untuk mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
3. Mencapai tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
4. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemerintah yang amanah dengan pemberi amanah.
5. Agar mendapatkan informasi yang komprehensif tentang proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui perencanaan program yang terkoordinir dan partisipatif.
7. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
8. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi .
9. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
10. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA



B. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan dalam hal ini Visi merupakan suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Pernyataan Visi yang artikulasi yang akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang, sehingga dapat melaksanakan sesuai target yang sesuai dengan Misi sekretariat DPRD yaitu **Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat yang bertujuan dari pada Misi**

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan perkembangan.
2. Meningkatkan tertib administrasi kesekretariat yang akuntabel dan transparan.
3. Meningkatkan fasilitasi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Visi tersebut mengandung makna adanya upaya yang maksimal dari seluruh aparatur untuk bisa lebih Profesional didalam pelaksanaan tugas pelayanan dan kelancaran sehingga mampu menjadi institusi yang Profesional dan Berkualitas. Sesuai dengan tujuan OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara *“Meningkatkan Kualitas Fasilitasi terhadap Agenda Kegiatan DPRD “*

Perumusan misi Organisasi harus memperhatikan dan menampung masukan dari pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA



perkembangan Organisasi.

2. Meningkatkan tata tertib administrasi kesekretariatan yang Akuntabel dan Transparan.
3. Meningkatkan Fasilitas serta ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

C. Sistematika Penyusunan

Ruang lingkup penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi.

Sistematika Perjanjian kinerja dilaksanakan secara Akuntabel dan kinerja Instansi pemerintah dan peningkatan Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara meliputi sebagai berikut :

I. Pendahuluan

(Latar belakang, Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Sistematika Penyusunan).

II. Landasan Hukum

III. Penetapan Kinerja

IV. Penutup

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA



BAB II

LANDASAN HUKUM

Permasalahan yang sering timbul dalam suatu OPD adalah bagaimana melihat dan mengukur transparansi, capaian dan kinerja seluruh pegawainya, hal ini diperlukan ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap OPD serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui capaian kinerja yang dihasilkan pemerintah tersebut. Sesuai ketentuan yang sudah berlaku sehingga Penetapan Kinerja merupakan Perjanjian jenis kegiatan dasar dalam mencapai penyusunan laporan yang akuntabel dan profesionalisme kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun yang menjadikan landasan hukum untuk Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9)
2. Undang – undang No. 23 tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Undang – undang Nomor 18 tahun 20016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
4. Undang – undang Nomor 33 tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 5.

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2006 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 9 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
9. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 389 Tahun 2003 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
10. Menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 066/132/OGR tanggal 18 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Pelaporan Kinerja Tahun 2016, Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupataen Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanaegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA



Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94)

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA



BAB III

PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Merupakan bagian dari pada unsur pelaksana dan penggerak roda pemerintahan sehingga dengan disusun Perjanjian Kinerja yang dibuat dalam rangka menggambarkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Merupakan kegiatan yang nyata secara sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penetapan kinerja dan perjanjian kinerja yang ditetapkan secara selektif dalam substansi strategis pencapaian tujuan

Adapun Penetapan Kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.

Pernyataan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk yang ditetapkan tersebut.

Pada hari senin, tanggal 17 Februari 2022 bertempat di ruang Serba Guna Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 antara Sekretaris DPRD dengan para Kepala Bagian dan Kepala Bagian dengan Kepala Sub Bagian,

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA



yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan beserta staf dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Selanjutnya dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam lampiran berikut : *(Lampiran 1)*.



PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA



BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dapat di sinergikan dengan program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Melalui penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 diharapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, yang dimaksud Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran tahun 2022 sekretariat DPRD diharapkan dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan kewenangan yang disampaikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022

Penetapan kinerja ini merupakan implementasi peraturan perundang – undangan guna memberikan penjelasan kepada Publik bahwa segenap Aparatur telah menyatakan komitmennya untuk bekerja secara sungguh – sungguh mewujudkan tuntutan publik sehingga terwujud Profesionalisme pegawai yang mampu melaksanakan kinerja secara Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang **Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan** Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat yang bertujuan dari pada Misi Sekretariat DPRD , Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, serta Meningkatkan pelayanan publik pemerintahan daerah.

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA



KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan Rahmatnya dan hidayahnya sehingga dapat menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagai bentuk awal pertanggung jawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan Perjanjian Kinerja ini, diharapkan para pemangku jabatan agar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sehingga pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, efektif dan akuntabel adalah di perlukan sikap yang sungguh-sungguh oleh seluruh penyelenggara Pemerintah terutama baik yang diberi amanah sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan, maka seluruh pejabat structural Sekretariat DPRD membuat dan menyatakan secara tertulis untuk merealisasikan kegiatan dengan pertanggungjawaban melalui Perjanjian Kinerja kepada atasan

Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan public dan kesejahteraan rakyat.

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KUTAI KARTANEGARA



Demikianlah Penyusunan laporan Penetapan Kinerja ini bila mana masih terdapat kekurangan oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan dapat memberi saran dan masukan agar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja berikutnya menjadi lebih baik. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, sehingga Perjanjian Kinerja tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat di selesaikan.

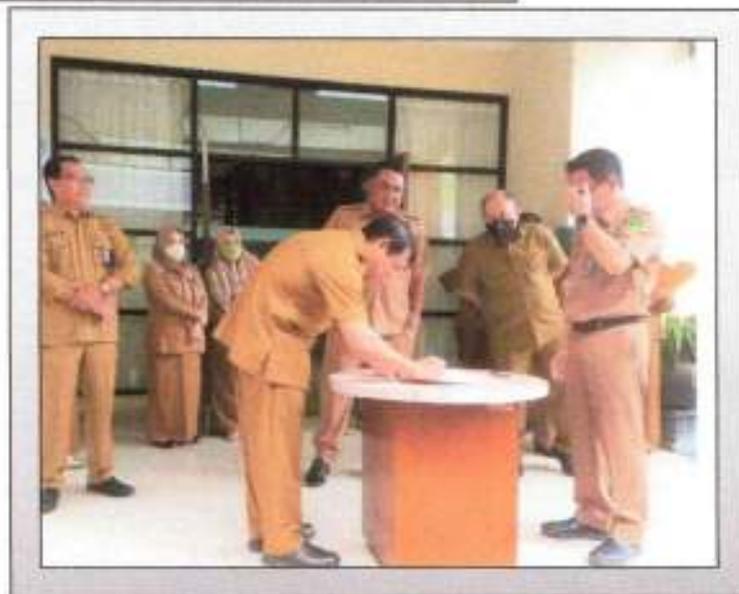
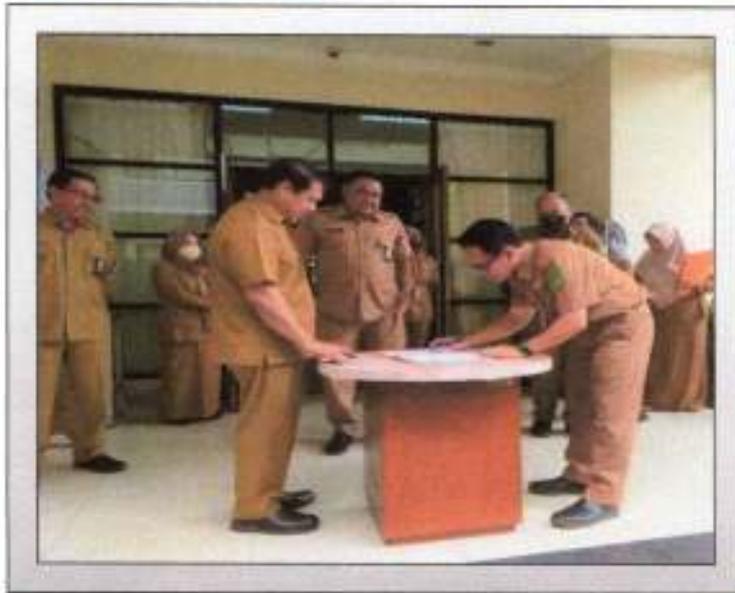
Kutai Kartanegara, 17 Februari 2022
Sekretaris DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara

H.M. Ridha Darmawan, SP., MP
Pembina Utama Muda
NIP: 19701117 199803 1 008

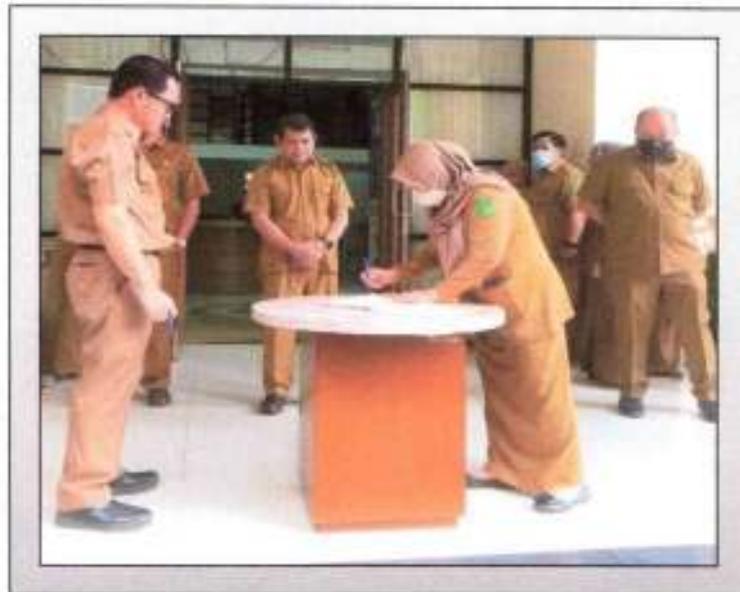
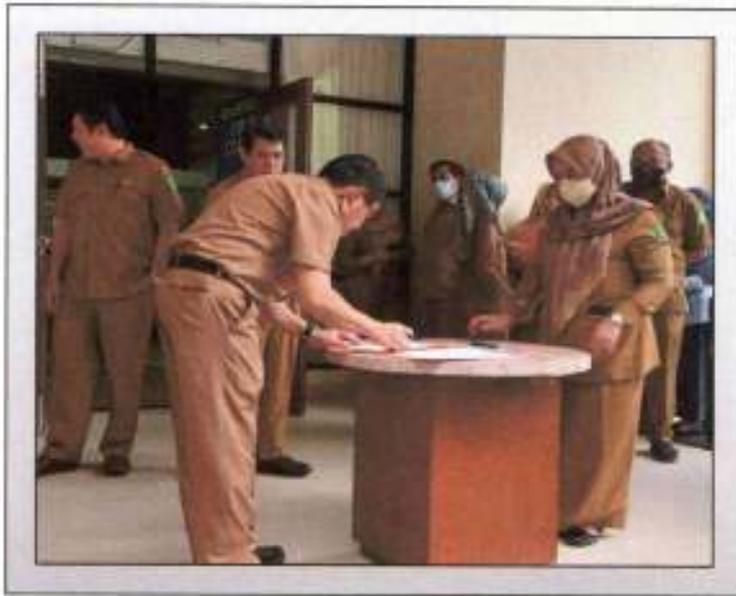


LAMPIRAN

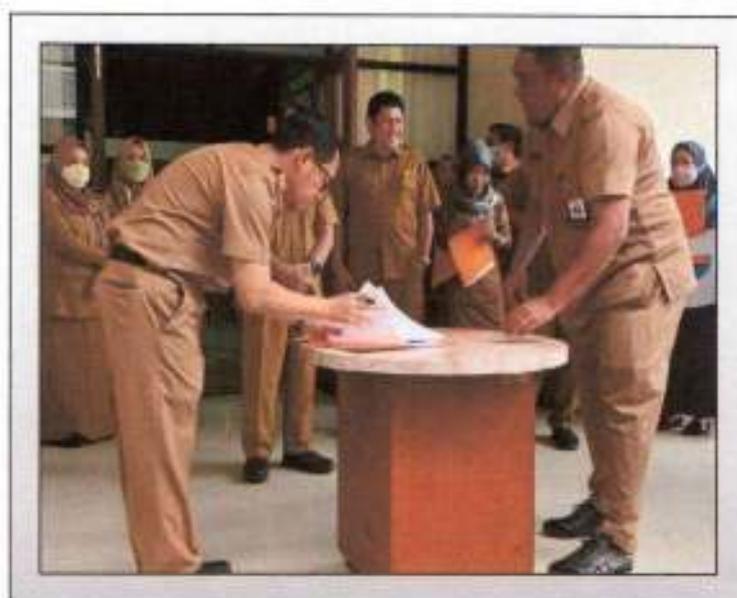
**KEPALA BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN**



**SUB BAGIAN
KOORDINATOR AKUNTASI DAN PELAPORAN**



SUB BAGIAN
KOORDINATOR PERENCANAAN & PENGANGGARAN



**KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**



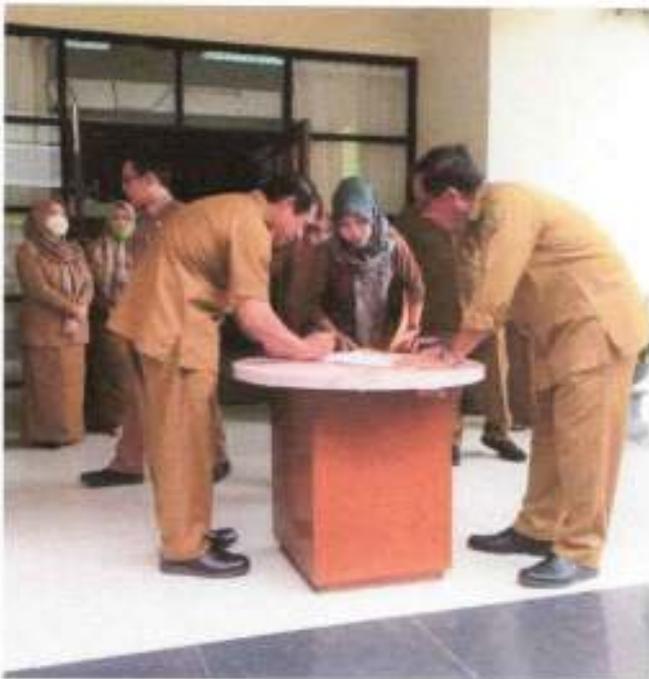
**SUB KOORDINATOR
KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN**



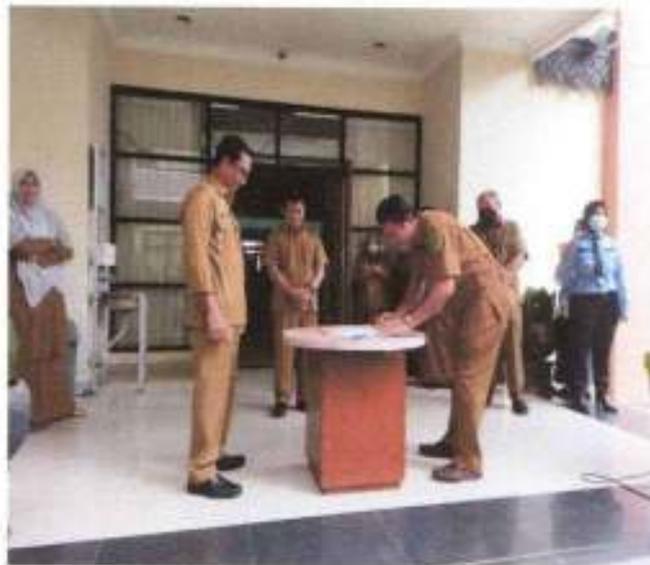
**SUB KOORDINATOR
PERSIDANGAN DAN RISALAH**



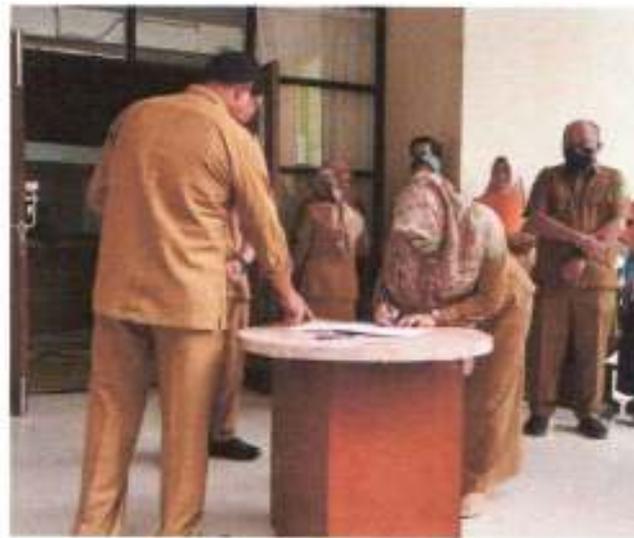
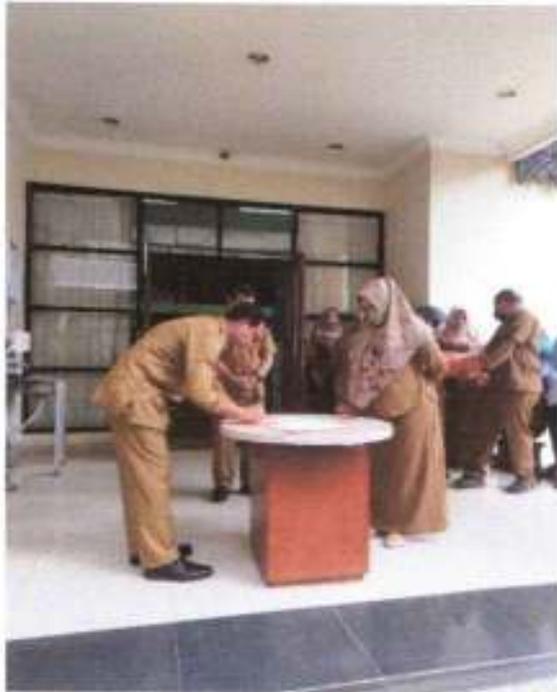
**KEPALA BAGIAN
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**



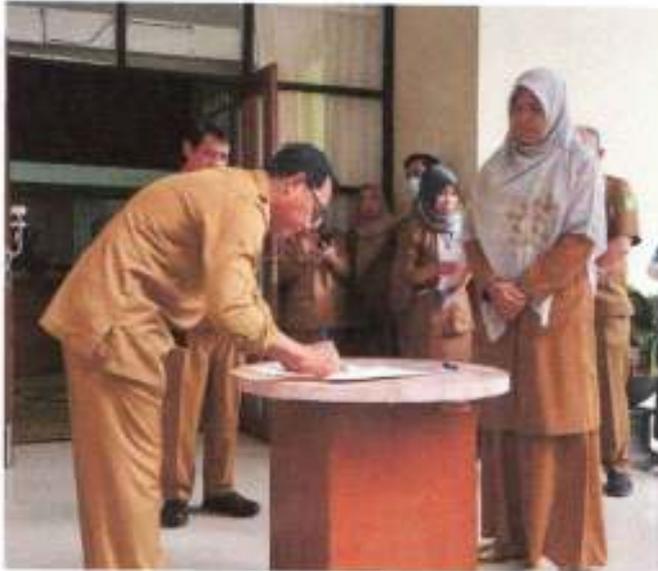
SUB. KOORDINATOR KERJASAMA & ASPIRASI



**KEPALA BAGIAN
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**



**KEPALA BAGIAN
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**



**SUB KOORDINATOR
TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN**



**KEPALA SUB
KOORDINATOR RUMAH TANGGA**





PERJANJIAN KINERJA

**SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. RIDHA DARMAWAN., SP., MP**

Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu dan berkesesuaian;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DPRD


M. RIDHA DARMAWAN., SP., MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701117 199803 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
		Jumlah Aset Kendaraan yang di tertibkan	Jumlah	44
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	1
		Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
5	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	82.689.502.500	
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	44.710.497.500	
JUMLAH ANGGARAN		127.400.000.000	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DPRD


M. RIDHA DARMAWAN., SP., MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701117 199803 1 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.DEDY MULYADI,SE.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP**

Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
7. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
8. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DEWAN



H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP
Pembina Utama Muda
NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN UMUM



H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si
Pembina
NIP19800509 200112 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Dokumen	4
2	Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan	Layanan	6
3	Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit	Unit	1,389
4	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan	Bulan	12
5	Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit	Unit	254
6	Terlaksananya layanan Administrasi DPRD	Jumlah layanan	Layanan	3
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Pengelolaa Aset	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100

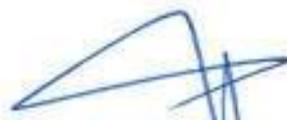
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan		Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.196.941.500,-	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 3.418.192.800,-	APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.399.999.000,-	APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 8.433.380.880,-	APBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.006.293.600,-	APBD
6	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 2.449.787.400,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.20.904.595.180,-	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DEWAN



H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP
Pembina Utama Muda
NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN UMUM



H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si
Pembina
NIP19800509 200112 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya **DEDY MULYADI, SE., M.Si** Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

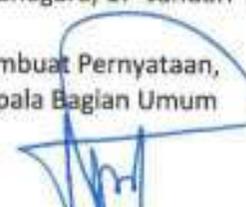
1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest ktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan,
Sekretaris Dewan,


H.M. RIDHA DARMAWAN.SP.,MP
Pembina Utama muda
Nip.19701117 199803 1 008

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pembuat Pernyataan,
Kepala Bagian Umum


DEDY MULYADI, SE., M.Si
Pembina
Nip.19800509 200801 1 916



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. NINA MARTINI.,S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM



H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si

Pembina

NIP. 19800509 200112 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN**



Hj. NINA MARTINI.,S.Sos

Penata Tingkat I

NIP.19650423 198703 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	4
2	Tersediannya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan	Layanan	6
3	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Surat	Bulan	12

TUGAS SEBAGAI KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	Orang	50
2	Terselenggaranya Bimbingan Tenis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang	Orang	20
3	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat	Laporan	218
4	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Berkas	Berkas	7

5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	Laporan	12
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	
Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 723.137.000,-	
2	Bimbingan Tenis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 350.000.000,-	

3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	Rp. 100.000.000,-	
4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 85.200.000,-	
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.870.000,-	
JUMLAH ANGGARAN		Rp.1.262.207.000,-	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM



H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si

Pembina

NIP. 19800509 200112 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN**



Hj. NINA MARTINI.,S.Sos

Penata Tingkat I

NIP.19650423 198703 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya **Hj.NINA MARTINI.S.Sos** Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest ktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Pembuat Pernyataan,
Kepala Bagian
Umum

DEDY MULYADI., SE., M.Si
Nip.19800509 200801 1 916

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pembuat Pernyataan,
Kepala Sub Bagian
Tata usaha dan kepegawaian

Hj.NINA MARTINI.S.Sos
Nip.19650423 198703 2 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEWI SASMITA.,S.Sos.,MM**

Jabatan : **PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA
SELAKU SUB KOORDINATOR RUMAH TANGGA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja pada pekerjaan yang memiliki standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis, dengan output hasil pekerjaan konstruksi, layanan, atau system;
2. Menyusun harga perkiraan sendiri pada pekerjaan yang memiliki standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis, dengan output hasil pekerjaan konstruksi layanan, atau system;
3. Melakukan konsolidasi untuk paket pengadaan barang/jasa sejenis;
4. Menganalisis hasil klarifikasi usulan barang/jasa;
5. Melakukan penyusunan daftar penyediaan barang/jasa pemerintah;

6. Melakukan perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk surat perjanjian;
7. Melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak pada pekerjaan yang memiliki standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis, dengan output hasil pekerjaan konstruksi, layanan, atau system;
8. Melakukan serah terima hasil pengadaan pada pekerjaan yang memiliki standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis, dengan output hasil pekerjaan konstruksi, layanan, atau system;
9. Mengevaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

10. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
11. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
14. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
15. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
16. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
17. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

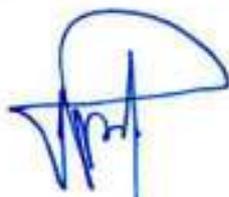
Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN UMUM

**PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR RUMAH TANGGA**



H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si

Pembina

NIP. 19800509 200112 1 008



DEWI SASMITA.,S.Sos.,MM

Pembina

NIP.19730109 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan	Bulan	12

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR RUMAH TANGGA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa	Bulan	12
2	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Bulan	12

	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100

sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan				
Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

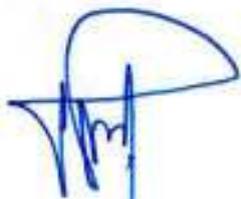
**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 2.499.999.600,-	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 5.929.511.280,-	
	JUMLAH ANGGARAN	Rp.8.429.510.880,-	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM



H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si
Pembina
NIP. 19800509 200112 1 008

Pihak Pertama,

**PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR RUMAH TANGGA**



DEWI SASMITA.,S.Sos.,MM
Pembina
NIP.19730109 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya **DEWI SASMIITA.S.Sos.MM** Sub Koordinator Rumah Tangga Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest ktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pembuat Pernyataan,
Kepala Bagian
Umum

DEDY MULYADI, SE., M.Si
Nip.19800509 200801 1 916

Pembuat Pernyataan,
Sub. Koordinator
Rumah Tangga

DEWI SASMIITA.S.Sos.MM
Nip.19730109 199503 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. SITI MASYITAH.,S.Sos**

Jabatan : **PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PERLENGKAPAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.DEDY MULYADI.,SE.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja pada pekerjaan yang memiliki standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis, dengan output hasil pekerjaan konstruksi, layanan, atau sistem;
2. Menyusun harga perkiraan sendiri pada pekerjaan yang memiliki standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis, dengan output hasil pekerjaan konstruksi layanan, atau sistem;
3. Melakukan perumusan pemaketan dan cara pengadaan sesuai strategi pengadaan;
4. Melakukan analisis belanja untuk pelaksanaan konsolidasi pengadaan;
5. Melakukan analisis pasar untuk pelaksanaan konsolidasi pengadaan;
6. Melakukan konsolidasi pada tahap perencanaan pengadaan;
7. Melakukan konsolidasi untuk paket pengadaan barang/jasa sejenis;
8. Menyusun konsep rekomendasi atau saran untuk pembinaan atau pendampingan pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahap perencanaan pengadaan;

9. Melaksanakan pendampingan, bimbingan teknis, atau konsultasi penggunaan sistem informasi atau aplikasi pada tahap perencanaan pengadaan;
10. Menyusun rekomendasi atau rencana tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan pada tahap perencanaan pengadaan;
11. Melakukan reviu dokumen persiapan pada tahap pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan tender, seleksi, atau penunjukan langsung;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

12. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
13. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
14. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
15. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
16. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
17. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
18. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN UMUM

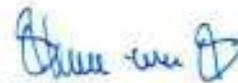


H. DEDY MULYADI., SE., M. Si

Pembina

NIP. 19800509 200112 1 008

**PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR PERLENGKAPAN**



Hj. SITI MASYITAH., S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19680427 200604 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Unit	4
2	Terlaksanannya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan	Layanan	3
3	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan	Layanan	6
4	Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit	Unit	1389

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PERLENGKAPAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	Unit	311
2	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan	Unit	4028
3	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	Porsi	9504
4	Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	Lembar	3180
5	Tersediannya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Bahan Bacaan	Exsemplar	38352
6	Tersediannya sarana dan Prasarana Gedung kantor	Jumlah Sarana	Unit	308

	atau Bangunan lainnya			
7	Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana	Unit	1081
8	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	Unit	47
9	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	Unit	47
10	Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	Unit	10
11	Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana	Unit	150
12	Tersediannya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan RT	Paket	4
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 123.804.500,-	APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 715.965.800,-	APBD
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 1.340.203.000,-	APBD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 815.924.000,-	APBD
5	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 360.900.000,-	APBD
6	Pengadaansarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Rp. 250.000.000,-	APBD
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 3.149.999.000,-	APBD

8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 311.048.000,-	APBD
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 311.505.000,-	APBD
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Rp. 423.728.100,-	APBD
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 960.012.500,-	APBD
12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga PRDD	Rp. 2.449.787.400,-	
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 11.212.877.300,-	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN UMUM



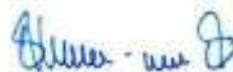
H. DEDY MULYADI, SE., M.Si

Pembina

NIP. 19800509 200112 1 008

Pihak Pertama,

**PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR PERLENGKAPAN**



Hj. SITI MASYITAH, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19680427 200604 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya Hj.SITI MASYITAH.S.Sos Sub Koordinator Perlengkapan Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest ktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Kutai Kartanegara 17 Januari 2022

Pembuat Pernyataan,
Kepala Bagian
Umum

DEDY MULYADI, SE., M.Si
Nip.19800509 200801 1 916

Pembuat Pernyataan,
Sub Koordinator
Perlengkapan


Hj.SITI MASYITAH.S.Sos
Nip.19680427 200604 2 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AW.AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP**

Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
7. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
8. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DEWAN



H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP
Pembina Utama Muda
NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,
**KEPALA BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN**



AW.AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.Si
Pembina
NIP.19720828 200112 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	12
2	Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah laporan	Laporan	5
3	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
4	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan	Layanan	2
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Pengelolaan Aset	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100

Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.469.850.033,-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 20.721.636.058,-	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 726.850.000,-	APBD
4	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 35.900.011.229,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 58.818.347.320,-	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DEWAN


H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP
Pembina Utama Muda
NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,
**KEPALA BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN**


AW.AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.Si
Pembina
NIP. 19720828 200112 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya AWANG AGUS DHARMAWAN,SE Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest ktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan,
Sekretaris Dewan,

H.M. RIDHA DARMAWAN.SP.,MP
Pembina Utama muda
Nip.19701117 199803 1 008

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pembuat Pernyataan,
Kepala Bagian
Program dan Keuangan

AWANG AGUS DHARMAWAN,SE
Pembina
Nip19720828 200112 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FARUQ RAHMAN.,S.Sos**

Jabatan : **PERENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN & PENGANGGARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,MP**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan .
2. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek.
3. Menyusun perencanaan program dan kegiatan
4. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan
5. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator :

6. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
7. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

8. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
9. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
10. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
11. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
12. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN**

**PERENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR PERENCANAAN &
PENGANGGARAN**

AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.S.i

Pembina

NIP. 19720828 200112 1 008



FARUQ RAHMAN.,S.Sos

Penata

NIP.19850126 200604 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	12
2	Terlaksanannya Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan	Layanan	5

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PERENCANAAN & PENGANGGARAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
2	Tersediannya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
3	Tersediannya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
4	Tersediannya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
5	Tersediannya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
6	Tersediannya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil	Jumlah laporan	Laporan	2

	koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD			
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	2
8	Tersediannya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Stel	Stel	520
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 229.400.000,-	APBD
2	Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	Rp. 219.389.000,-	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 180.212.200,-	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 212.348.833,-	APBD

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 169.700.000,-	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Rp. 229.400.000,-	APBD
7	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp. 229.400.000,-	APBD
8	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp. 470.450.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.1.940.300.033,-	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

PERENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PERENCANAAN & PENGANGGARAN

AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.Si
Pembina
NIP.19720828 200112 1 008

FARUQ RAHMAN.,S.Sos
Penata
NIP.19850126 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya FARUQ RAHMAN.S.Sos Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest ktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Menyaksikan,
Kepala Bagian
Program dan Keuangan

AWANG AGUS DHARMAWAN,SE
Nip.19720828 200112 1 008

Pembuat Pernyataan,
Sub Koordinator
Perencanaan dan Penganggaran

FARUQ RAHMAN.S.Sos
Nip.19850126 200604 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD DALEQ.,SE**

Jabatan : **ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR VERIFIKASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,MP**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menganalisis perhitungan dan realisasi APBD;
2. Menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinerja penganggaran per Bagian Anggaran;
3. Menelaah rencana kerja dan anggaran;
4. Menganalisis data lapangan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
5. Menguji validasi data realisasi dan perkiraan realisasi PNB (Outlook);
6. Menganalisis terhadap hasil validasi data terkait pelaksanaan pengelolaan PNB;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

7. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;

8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
9. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
10. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
11. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
12. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
13. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
14. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN**

Pihak Pertama,

**ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR VERIFIKASI**

AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.S.i

Pembina

NIP. 19720828 200112 1 008

MUHAMMAD DALEQ.,SE

Penata Muda Tingkat I

NIP.19730820 200112 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Laporan	Laporan	6
2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Persentase	Persen	100%

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR VERIFIKASI

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang	Orang/Bulan	2136
2	Terlaksananya Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan	Laporan	2
3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan	Bulan	12
4	Terlaksananya Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Orang	Orang	540
5	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang	Orang	120
6	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang	Orang	7
7	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
	Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 19.496.890.058,-	APBD
2	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 117.240.000,-	APBD
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 101.853.000,-	APBD

4	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp. 35.429.561.229,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.55.145.544.287.-	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN**

**ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR VERIFIKASI**

AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.Si

Pembina

NIP.19720828 200112 1 008

MUHAMMAD DALEQ.,SE

Penata Muda Tingkat I

NIP.19730820 200112 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya MUHAMMAD DALEQ,SE Sub.Koordinator Verifikasi Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest kif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan,
Kepala Bagian
Program & Keuangan

AWANG AGUS DHARMAWAN,SE
Nip.19720828 200112 1 008

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pembuat Pernyataan,
Sub Koordinator
Verifikasi

MUHAMMAD DALEQ,SE
Nip.19730820 200112 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. FITRIANI.,SE**

Jabatan : **ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR
AKUNTANSI & PELAPORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,MP**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi;
2. Menyusun konsep laporan hasil analisis;
3. Menganalisis data penerapan sistem penganggaran;
4. Menganalisis dan mengharmonisasikan usulan kebijakan/peraturan penganggaran;
5. Menganalisis dampak anggaran/fiscal atas usulan kebijakan/peraturan;
6. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan implementasi kebijakan/peraturan penganggaran;
7. Mengkaji peraturan yang mengalami kendala dan/atau permasalahan pada tataran implementasi
8. Menganalisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran;
9. Menyiapkan bahan bimbingan teknis penganggaran, dan
10. Melaksanakan bimbingan teknis penganggaran.

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

11. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan

dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;

12. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
13. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
14. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
15. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
16. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
17. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN**

**ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR AKUNTANSI &
PELAPORAN**

AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,M.S.i

Pembina

NIP. 19720828 200112 1 008

Hj. FITRIANI.,SE

Penata Tingkat I

NIP.19691124/199203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Keuangan Peangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Laporan	Laporan	6
2	Tersediannya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR AKUNTANSI & PELAPORAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1
2	Tersediannya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Kali	Kali	2
3	Tersediannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	18
4	Terlaksanannya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 41.150.000,-	APBD
2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 105.875.000,-	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 858.628.000,-	APBD
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 726.850.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.1.732.503.000,-	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

AWANG AGUS DHARMAWAN.,SE.,MP

Pembina

NIP. 19720828 200112 1 008

Pihak Pertama,

**ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR AKUNTANSI &
PELAPORAN**

Hj. FITRIANI.,SE

Penata Tingkat I

NIP.19691124 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180,

Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya Hj.FITRIANI,SE Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest ktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan,
Kepala Bagian
Program dan Keuangan

AWANG AGUS DHARMAWAN,SE

Nip.19720828 200112 1 008

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pembuat Pernyataan,
Sub Koordinator
Akuntansi dan Pelaporan

Hj.FITRIANI,SE

Nip.19691124 199203 2 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP**

Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
7. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
8. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DEWAN



H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP
Pembina Utama Muda
NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**



SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19650505 198602 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksanannya Rapat Pembahasan	Jumlah Rapat	Rapat	18
2	Terlaksanannya Pengawasan DPRD	Jumlah Kali	Kali	190
3	Terlaksanannya Persentase Kegiatan yang terlaksana	Jumlah Persentase	Persen	100
4	Terlaksanannya Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	Jumlah Persentase	Persen	100
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Pengelolaa Aset	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp.1.399.584.000.-	APBD
2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.4.595.513.000.-	APBD
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp.3.690.585.500.-	APBD
4	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp. 363.700.000.-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.10.049.382.500.-	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DEWAN



H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP
Pembina Utama Muda
NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**



SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19650505 198602 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya SOFIAN ASHURI.S.Sos.M.Si Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

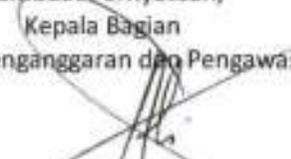
1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest ktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Menyaksikan,
Sekretaris Dewan,


H.M. RIDHA DARMAWAN.SP.,MP
Nip.19701117 199803 1 008

Pembuat Pernyataan,
Kepala Bagian
Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan


SOFIAN ASHURI.S.Sos.M.Si
Nip.19650505 198602 1 013



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DWI OKTIVIAWATY.,S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR FASILITASI PENGANGGARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan yang bersifat sederhana (instansional);
2. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
3. Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan;
4. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
5. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

6. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;

7. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
8. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
9. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
10. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
11. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
12. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR FASILITASI
PENGANGGARAN**

SOFIAN ASHURI., S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19650505 198602 1 013

DWI OKTIVIAWATY., S.Sos., M.Si

Penata Tingkat I
NIP.19721012 200112 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Rapat	Rapat	18
2	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan	Kali	190

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGANGGARAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan	Rapat	5
2	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan	Rapat	5
3	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan	Rapat	2
4	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan	Rapat	2
5	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Pembahasan	Rapat	2
6	Terlaksananya Pembahasan	Jumlah Pembahasan		2

	Pertanggungjawaban APBD		Rapat	
7	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan	Rapat	2
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen 100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp. 199.997.000,-	APBD
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 249.968.000,-	APBD
3	Pembahasan APBD	Rp. 249.968.000,-	APBD
4	Pembahasan APBD Perubahan	Rp. 249.968.000,-	APBD
5	Pembahasan Laporan Semester	Rp. 199.772.000,-	APBD
6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp. 249.911.000,-	APBD
7	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp. 100.013.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 1.499.597.000,-	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR FASILITASI
PENGANGGARAN**


SOFIAN ASHURI., S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650505 198602 1 013


DWI OKTIVIAWATY., S.Sos., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19721012 200112 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya DWI OKTIVIAWATY., S.Sos., M.Si Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara ProAktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest ktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pembuat Pernyataan,
Kepala Bagian Fasilitas
Penganggaran dan Pengawasan


SOFIAN ASHURI, S.Sos, M.Si
Nip.19650505 198602 1 013

Pembuat Pernyataan,
Sub Koordinator
Fasilitas Penganggaran


DWI OKTIVIAWATY., S.Sos., M.Si
NIP.19721012 200112 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITTI MAIMANAH.,S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR FASILITASI PENGAWASAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun rancana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
3. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
4. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
5. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;

6. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota.

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

7. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
9. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
10. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
11. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
12. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
13. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
14. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir);

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR FASILITASI
PENGAWASAN**


SOFIAN ASHURI., S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19650505 198602 1 013


SITTI MAIMANAH., S.Sos., M.Si

Penata Muda

NIP.19851010 201001 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksanannya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan	Kali	190
2	Terlaksanannya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Persentase	Persen	100%

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGAWASAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksanannya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	Jumlah Pengawasan	Laporan	36
2	Terlaksanannya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan	Laporan	36
3	Terlaksanannya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan	Laporan	36
4	Terlaksanannya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan	Laporan	36
5	Terlaksanannya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan	Laporan	36

6	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pengawasan	Dokumen	4
7	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan	Dokumen	4
8	Terlaksananya Penyusunan kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
9	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik	Jumlah Pengawasan	Laporan	10
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	10440
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	Rp. 557.500.000,-	APBD
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp. 557.500.000,-	APBD
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp.1.085.000.000,-	APBD
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp.1.060.000.000,-	APBD
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Rp. 557.500.000,-	APBD
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp. 339.000.000,-	APBD
7	Pemerintahan Pengguna Anggaran	Rp. 339.000.000,-	APBD
8	Penyusunan kode Etik DPRD	Rp. 88.700.000,-	APBD
9	Pengawasan Kode Etik	Rp. 275.000.000,-	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 4.859.200.000,-	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN**

SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19650505 198602 1 013

Pihak Pertama,

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR FASILITASI
PENGAWASAN**

SITTI MAIMANAH.,S.Sos.,M.Si

Penata Muda
NIP. 19851010 201001 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya SITTI MAIMANAH.S.Sos.M.Si Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest ktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Menyaksikan,
Kepala Bagian Fasilitas
Penganggaran dan Pengawasan

SOFIAN ASHURI, S. Sos. M. Si
Nip. 19650505 198602 1 013

Pembuat Pernyataan,
Sub Koordinator
Fasilitasi Pengawasan


SITTI MAIMANAH.S.Sos.M.Si
Nip. 19851010 201001 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. AKHMAD.,SE.,MM**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN ASPIRASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SOFIAN ASHURI.,S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. (Butir-butir kegiatan Jabatan Fungsional (Jenjang) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Jabatan Fungsional tersebut. Pilih butir-butir kegiatan yang relevan untuk di kerjakan dan di capai);
2. (Butir-butir kegiatan Jabatan Fungsional (Jenjang) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Jabatan Fungsional tersebut. Pilih butir-butir kegiatan yang relevan untuk di kerjakan dan di capai)

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

3. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;

4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

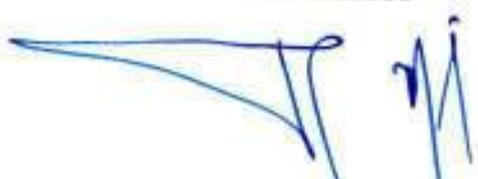
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN
ASPIRASI**


SOFIAN ASHURI., S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650505 198602 1 013


H. AKHMAD., SE., MM
Penata Tingkat I
NIP.19690101 199301 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan	Persen	100%

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN ASPIRASI

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyusunan Pokok-Pokok Fikiran DPRD	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
2	Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100

Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyusunan Pokok-Pokok Fikiran DPRD	Rp. 136.411.000,-	APBD
2	Pelaksanaan Reses	Rp.3.554.174.500,-	APBD
3			
dst			
JUMLAH ANGGARAN		Rp.3.690.585.500,-	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

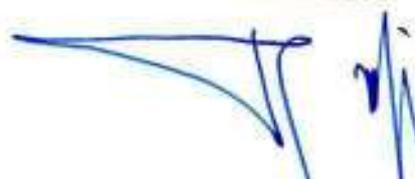
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN**

**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN
ASPIRASI**


SOFIAN ASHURI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650505 198602 1 013


H. AKHMAD, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP.19690101 199301 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya H.AKHMADE.MM Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest ktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Kepala Bagian Fasilitas
Penganggaran dan Pengawasan

SOFIAN SAHURI, S.Sos, M.Si
Nip.19650505 198602 1 013

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pembuat Pernyataan,
Sub Koordinator
Kerjasama dan Aspirasi

H.AKHMADE.MM
Nip.19690101 199301 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP**

Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan;
7. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
8. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

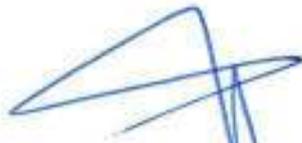
1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DEWAN



H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP

Pembina Utama Muda

NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**



NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos

Pembina

NIP.19731108 200312 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya layanan Administrasi DPRD	Jumlah layanan	layanan	3
2	Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat	Jumlah Peraturan Daerah	PERDA	16
3	Terlaksananya Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Persentase	Persen	100
4	Terlaksananya Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Persentase	Persen	100
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Pengelolaan Aset	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Layanan Administrasi DPRD	RP. 2.966.560.000.-	APBD
2	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	RP. 8.150.134.000.-	APBD
3	Peningkatan Kapasitas DPRD	RP. 8.905.894.000.-	APBD
4	Fasilitasi Tugas DPRD	RP.17.605.087.000.-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		RP.37.627.560.000.-	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DEWAN



H.M.RIDHA DARMAWAN.,SP.,MP

Pembina Utama Muda
NIP.19701117 199803 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**



NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos

Pembina
NIP. 19731108 200312 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya NURHAYATI TOURISTIANY,S.Sos. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara ProAktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest ktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan,
Sekretaris Dewan,

H.M. RIDHA DARMAWAN.SP.,MP

Pembina Utama muda
Nip.19701117 199803 1 008

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pembuat Pernyataan,
Kepala Bagian
Persidangan dan Perundang-undangan

NURHAYATI TOURISTIANY,S.Sos

Pembina
Nip.19731108 200312 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAFLIANSAH.,SH.,MH**
Jabatan : **PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR KAJIAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos**
Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG
UNDANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan Kajian Perundang-undangan;
2. Membuat konsep bahan Penyusunan Naskah Akademik;
3. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
4. Merancang bahan pembahasan Peraturan Daerah;
5. Membuat konsep bahan penyiapan draf peraturan daerah inisiatif;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG UNDANGAN**

**PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR KAJIAN PERUNDANG-
UNDANGAN**



NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos
Pembina

NIP. 19731108 200312 2 001



SYAFLIANSAH.,SH.,MH
Penata Tingkat I

NIP. 19771024 200701 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturab DPRD	Jumlah PERDA	PERDA	16
TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR KOORDINATOR KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN				
NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
2	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Koordinasi	Koordinasi	96
3	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Rapat	Rapat	14
4	Tersediannya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Rapat	Rapat	96
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp. 268.750.000,-	APBD
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 6.561.934.000,-	APBD
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp. 381.650.000,-	APBD
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp. 937.800.000,-	APBD
5	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp. 1.505.300.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.9.655.434.000,-	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG UNDANGAN

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

NURHAYATI TOURISTIANY., S.Sos

Pembina

NIP. 19731108 200312 2 001

SYAPLIANSAH., SH., MH

Penata Tingkat I

NIP. 19771024 200701 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya **SYAFLIANSYAH,SH,MH** Sub Koordinator Kajian Perundang - undangan Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest ktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pembuat Pernyataan,
Kepala Bagian
Persidangan dan Perundang-undangan

NURHAYATI TOURISTIANY, S.Sos
Nip.19731108 200312 2 001

Pembuat Pernyataan,
Sub Koordinator
Kajian perundang - undangan


SYAFLIANSYAH,SH,MH
Nip.19771024 200701 1 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. EVVA HANDAYANIE.,SE**

Jabatan : **PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA SELAKU
SUBKOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG
UNDANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Merencanakan pembuatan validasi risalah;
2. Memeriksa kelengkapan validasi risalah rapat;
3. Menelaah dan menyerahkan risalah rapat yang sudah divalidasi kepada pengguna/penyelenggara rapat untuk mendapat pengesahan;
4. Menyusun buku himpunan risalah rapat.
5. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya.
6. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

7. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
9. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
10. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
11. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
12. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
13. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir);

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DAN PERUNDANG UNDANGAN**

NURHAYATI TOURISTIANY., S.Sos

Pembina

NIP. 19731108 200312 2 001

Pihak Pertama,

**PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA
SELAKU SUB KOORDINATOR
PERSIDANGAN DAN RISALAH**

Hj. EVVA HANDAYANIE., SH

Penata

NIP. 19761022 201001 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Persentase	Persen	100
2	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Persentase	Persen	100
TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH				
NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksanannya Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen	Dokumen	1
2	Terlaksanannya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi	Koordinasi	96
3	Tersediannya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat	Rapat	14
4	Tersediannya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat	Rapat	349
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31	Persen	100

		Maret 2022		
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp. 201.224.000,-	APBD
2	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp. 12.263.563.000,-	APBD
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp. 341.524.000,-	APBD

4	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp. 2.930.060.000,-	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp.15,736,371.000,-	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DAN PERUNDANG UNDANGAN**



NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos

Pembina

NIP. 19731108 200312 2 001

Pihak Pertama,

**PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA
SELAKU SUB KOORDINATOR
PERSIDANGAN DAN RISALAH**



Hj. EVVA HANDAYANIE.,SH

Penata

NIP. 19761022 201001 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya **HLEWA HANDAYANIE.SH** Sub Koordinator Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest kif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta lurut menjaga kehormatan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Pembuat Pernyataan,
Kepala Bagian
Persidangan dan Perundang-undangan

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pembuat Pernyataan,
Sub Koordinator
Persidangan dan Risalah

NURHAYATI TOURISTIANY,S.Sos
Nip.19731108 200312 2 001

HLEWA HANDAYANIE.SH
Nip.19761028/201001 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LITA ROSARIA FEBRYANTI.,S.Pi.,MM**

Jabatan : **PRANATA HUMAS AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR HUMAS, PROTOKOL DAN PUBLIKASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG
UNDANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun rencana kerja pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan;
2. Mengikuti rapat pimpinan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan kehumasan;
3. Mengevaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan;
4. Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang bersifat program;
5. Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan,yang bersifat rutin;
6. Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan,yang bersifat berkala;
7. Mengevaluasi model layanan informasi dan kehumasan;
8. Mengolah isu hubungan internal;

9. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan dengan kalangan media atau pers sebagai peserta;
10. Mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan pelayanan informasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) atau pertemuan sejenis, sebagai peserta;
11. Mengikuti seminar, lokakarya, pertemuan yang terkait dengan pelayanan informasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) atau pertemuan sejenis, sebagai moderator;
12. Melaksanakan kegiatan kunjungan jurnalis sebagai peserta;
13. Melaksanakan tugas sebagai pemandu acara (master of ceremony);
14. Melakukan wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan; Mengikuti kunjungan kerja atau acara seremonial pimpinan;
15. Mengikuti kunjungan kerja atau acara seremonial pimpinan;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

16. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
17. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
18. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
19. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
20. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
21. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
22. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
23. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

24. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DAN PERUNDANG UNDANGAN**

**PRANATA HUMAS AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR HUMAS,
PROTOKOL DAN PUBLIKASI**

NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos

LITA ROSARIA FEBRYANTI.,S.PI.,MM

Pembina

Pembina

NIP. 19731108 200312 2 001

NIP. 19780203 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Persentase	Persen	100%

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR HUMAS, PROTOKOL DAN PUBLIKASI

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Peserta	Orang	45
2	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Media	Media	15
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100

jabatan				
Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pendalaman Tugas DPRD	Rp. 1.825.000.000,-	APBD
2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp. 3.953.620.000,-	APBD
3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp. 5.000.000.000,-	APBD
4	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp. 1.125.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.11.903.620.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DAN PERUNDANG UNDANGAN**

**PRANATA HUMAS AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORDINATOR HUMAS,
PROTOKOL DAN PUBLIKASI**




NURHAYATI TOURISTIANY.,S.Sos

LITA ROSARIA FEBRYANTI.,S.Pi.,MM

Pembina

Pembina

NIP. 19731108 200312 2 001

NIP. 19771024 200701 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Telp (0541) 661022, 661180, Kotak Pos.

No. : 2

FAKTA INTEGRITAS

Saya **LITA ROSARIA FEBRYANTI.S.PI.MM** Sub Koordinator Humas,Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD, Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara Pro Aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest ktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap untuk menghadapi konsekuensinya.

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pembuat Pernyataan,
Kepala Bagian
Persidangan dan Perundang-undangan

NURHAYATI TOURISTIANY,S.Sos
Nip.197311082003122001

Pembuat Pernyataan,
Sub Koordinator
Humas,Protokol dan Publikasi

LITA ROSARIA FEBRYANTI.S.PI.MM
Nip.197802032001122001